

**PEMBATASAN JUMLAH AGAMA OLEH NEGARA
DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 PNPS
TAHUN 1965**

SKRIPSI



OLEH :

DIOVAN ADY PRASTYANA DEVA
NBI : 1311900192

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PEMBATASAN JUMLAH AGAMA OLEH NEGARA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 PNPS
TAHUN 1965**

SKRIPSI



Oleh :

DIOVAN ADY PRASTYANA DEVA

NBI : 1311900192

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**PEMBATASAN JUMLAH AGAMA OLEH NEGARA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 PNPS TAHUN 1965**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

DIOVAN ADY PRASTYANA DEVA
NBI : 1311900192

Dosen Pembimbing :


Dr. TOMY MICHAEL, S.H., M.H
NPP/NIP : 20310130613

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**PEMBATASAN JUMLAH AGAMA OLEH NEGARA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 PNPS TAHUN 1965**

Oleh :

DIOVAN ADY PRASTYANA DEVA

NBI : 1311900192

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 14 Juni 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 640/ST/FH/VI/2023
Tanggal : 06 Juni 2023

TIM PENGUJI :

Ketun : **Djono Wahyoono, S.H., M.Hum.**
NPP : 20310880149

Sekretaris : **Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.**
NPP : 20310870120

Anggota : **Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., CMC.**
NPP : 20310200828

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diovan Ady Prastyana Deva

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *POLIGOVIS : Journal Political and Government Issues* dengan judul

**"MAKNA PEMBATAHAN JUMLAH AGAMA OLEH NEGARA
BERDASARKAN UU PNPS NO. 1 TAHUN 1965"**

Benar bebas dari plagiasi, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 26 April 2023

pernyataan



**METERAI
TEMPEL**
8DAKX448857195
Diovan Ady Prastyana Deva
NBI 1311900192

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diovan Ady Prastyana Deva

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di *POLIGOV'S : Journal Political and Government Issues* dengan judul :

Makna Pembatasan Jumlah Agama Oleh Negara Berdasarkan UU PNPS No. 1 Tahun 1965.

Benar bebas dari publikasi ganda, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 April 2023

Y. taan



Diovan Ady Prastyana Deva

NBI : 1311900192

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diovan Ady Prastyana Deva

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa 'Skripsi' yang saya buat yang berjudul :

"PEMBATASAN JUMLAH AGAMA OLEH NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 PNPS TAHUN 1965"

Merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan 'Duplikasi' dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, Saya bersedia jika skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 26 April 2023

Y
tagh
METERAL
TEMPEL
9AAVX448857194



Diovan Ady Prastyana Deva
NBI : 1311900192

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diovan Ady Prastyana Deva

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PEMBATASAN JUMLAH AGAMA OLEH NEGARA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 PNPS TAHUN 1965”.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 April 2023

Y
taan
METERAL
TEMPEL
24AKX448857199

Diovan Ady Prastvana Deva

NBI : 1311900192

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk setiap warga negara yang memperjuangkan haknya dalam kebebasan beragama dan terbebas dari stigma buruk dan tindakan diskriminatif

KATA PENGANTAR

Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan rahmatnya sehingga meridhai Kesehatan dan kelancaran kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pembatasan Jumlah Agama oleh Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965”** dengan cukup baik. Laporan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Walaupun begitu, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tidak akan dapat selesai tepat waktu tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Sehingga pada kesempatan ini, Penulis memberikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini yakni kepada :

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., CMC., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah sabar memberikan informasi terkait skripsi di Fakultas Hukum.
3. Dr. Tomy Michael, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang senantiasa memberikan diskusi dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H, selaku Dosen mata kuliah MPH dan dosen yang memberikan Penulis inspirasi untuk menulis skripsi ini.
5. Suyono, S.H dan Tri Umbayani Adi Rukmi, S.H., M.Si, selaku kedua orang tua Penulis yang selalu membantu dan memberi dukungan kepada Penulis.
6. Gus Aan Anshori selaku Presidium Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) dan Bapak Toni Harsono selaku Ketua Pengurus Tempat Ibadah Tri Dharma Hong San Kiong yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam wawancara penggalan data untuk bahan skripsi.
7. Rizky Wahyunto, Raihan, Ivan, Pris Anang., Rizky Rahmadani, Revita, dan Afifah selaku teman Penulis yang memberi dukungan kepada Penulis.
8. Perdana selaku teman Penulis dan Kak Vindhy selaku kakak Penulis yang meminjamkan laptopnya kepada Penulis.
9. Kak Dea yang memberi tips dan motivasi menulis skripsi kepada Penulis.
10. Anissa Rahmawati selaku teman Penulis yang senantiasa mengingatkan, memberi motivasi, dan sharing dengan Penulis.

ABSTRAK

Dalam kehidupan beragama di Indonesia, negara memiliki intervensi di dalamnya. Tujuan dari intervensi negara adalah pada dasarnya untuk memberikan perlindungan kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 sebagai salah satu UU yang mengatur kehidupan beragama di Indonesia dianggap mengalami pergeseran nilai dan cenderung bersifat diskriminatif. Salah satu bentuk diskriminasi yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 adalah disebutkannya agama-agama tertentu yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu (Confusius), selain itu juga disebutkan Yahudi, Zarasustrian, Shinto, dan Taoism. Penyebutan agama-agama tersebut memunculkan asumsi bahwa agama tersebut mendapatkan pengakuan secara resmi dari negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 menjadi payung hukum yang melegitimasi tindakan diskriminatif dalam kehidupan beragama, dan untuk mengetahui bagaimana konsep pembatasan jumlah agama yang dilakukan oleh negara, serta bagaimana kondisi kebebasan beragama di Indonesia. Jawaban dari penelitian ini adalah sudah tidak relevannya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 terhadap kondisi kehidupan beragama sekarang ini. Pada hakikatnya, negara tidak pernah secara eksplisit menyebutkan adanya agama resmi, namun *privilege* yang diberikan negara terhadap agama-agama tertentu mengindikasikan adanya pembedaan perlakuan negara terhadap agama yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS dengan agama yang tidak disebutkan.

Kata kunci : Agama, Kebebasan Beragama, Negara

ABSTRACT

In religious life in Indonesia, the state has intervention in it. The purpose of state intervention is basically to provide protection for freedom of religion for every citizen. UU No. 1 PNPS 1965 as one of the laws that regulates religious life in Indonesia is considered to have experienced a shift in values and tends to be discriminatory. One form of discrimination contained in Law No. 1 PNPS 1965 mentions certain religions namely Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism, besides that it also mention Judaism, Zarasustrian, Shinto, and Taoism. The mention of these religions raises the assumption that these religions receive official recognition from the state. The study aims to find out and analyze the extent to which Law No. 1 PNPS 1965 becomes the basic that legitimizes discriminatory acts in religious life, and to find out how the concept of limiting the number of religions carried out by the state, and how condition of religious life. In essence, the state has never explicitly mentioned the existence of an official religion, but the privilege granted by the state to certain religion indicate that there is a difference in the state treatment of religions as stated in Law No. 1 PNPS 1965 with an unspecified religion.

Keywords : Religion, Freedom of Religion, State

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian.....	6
1.5.2 Metode Pendekatan.....	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	8

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Hak Asasi Manusia	11
2.2 Konsep Perlindungan Hukum	16
2.3 Pengertian Kesamaan di Depan Hukum	18
2.4 Konsep Agama	22
2.5 Konsep Kebebasan Beragama.....	25
2.6 Konsep Toeransi.....	28
2.7 Hubungan Negara dengan Agama.....	31
BAB III PEMBAHASAN.....	35
3.1 Pembatasan Jumlah Agama	35
3.2 Pengakuan Agama oleh Negara	49
3.1 Batasan Makna Agama dan Aliran Kepercayaan.....	61
BAB IV PENUTUP.....	71
4.1 Simpulan.....	71
4.2 Saran.....	71
DAFTAR BACAAN.....	73
LAMPIRAN	83